

UPAYA PEMERINTAH MEMOBILISASI PARTISIPASI PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN ORGANISASI (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

Agustinus Kehi Mau, Emei Dwinanarhati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email: agustinuskehi01@gmail.com

Abstract: *Actuating participation is an effort to involve the community in the implementation of development carried out by the government. If the participation treats society as the subject of development, the mobilization tends to treat humans as the objects of development. To determine the informants it used a purposive sampling so that the research informants were the Village Head of Pendem, BPD of Pendem, Head of Hamlet, Chair of RW and RT. The data was obtained through interview, observation, and documentation. The results of the research found that the efforts of government apparatus in mobilizing community participation by carrying out informal approaches, identification, community forums, and strengthening/mentoring.*

Keywords: *Government, mobilization, development*

Abstrak: Mobilisasi partisipasi merupakan salah satu upaya mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila partisipasi memperlakukan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan maka mobilisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai obyek dari pembangunan. Teknik menentukan informan yaitu *purposive sampling* sehingga yang menjadi informan penelitian yaitu Kepala Desa Pendem, BPD Desa Pendem, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Data diperoleh melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian yaitu adanya upaya aparatur pemerintah dalam mobilisasi partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan informal, identifikasi, forum masyarakat, dan penguatan / pendampingan.

Kata Kunci: Pemerintah, mobilisasi, pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, Sigalingging dan Warjio (2014:116) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki posisi yang penting dalam perencanaan dan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Namun jika kita meninjau kembali, model pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*) belum maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan. UU tersebut menekankan pada perpaduan pendekatan konsep antara *top-down* dan *bottom-up* yang menekankan cara-cara aspiratif dan partisipasif. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi ketidaksadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Selain dari ketidaksadaran masyarakat, ada juga faktor lain yang dikarenakan terjadinya pergeseran kultur (budaya). Pergeseran kultur sangat terlihat jelas dari sisi budaya dalam hal gotong royong atau kerja sama telah pudar. Pudarnya budaya yang dianut oleh masyarakat desa dikarenakan poros kehidupan masyarakat telah bergeser dari masyarakat desa menjadi masyarakat desa kota. Jika hal ini terjadi, sebaik apapun sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah

maupun masyarakat telah berorientasi pada kepentingan masyarakat tidak mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Mobilisasi partisipasi merupakan salah satu upaya mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mendapat respon dari masyarakat melalui gerakan partisipasi aktif. Dalam artian masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan akan mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Dengan adanya mobilisasi partisipasi yang diperankan oleh pemerintah dapat menyadarkan masyarakat yang berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial. Hal ini sangat sejalan dengan pendapatnya Gaventa dan Valderma yang dikutip oleh Dwiningrum (2011:34-35), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Konsep pembangunan desa haruslah melihat ciri-ciri fisik dari pada desa itu sendiri. Artinya bahwa struktur fisik suatu desa itu berbeda dengan desa yang lainnya, sehingga pembangunan desa harus disesuaikan dengan letak geografis suatu desa. Di mana harus memperhatikan melihat iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, tingkat kelembaban udara, serta topografi desa tersebut (Rahardjo, 2010:). Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Strategi pembangunan desa perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat desa.

Untuk mendorong desa menjadi sejahtera dan mandiri adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik desa maupun pemerintah daerah saja, melainkan keterlibatan semua pihak menjadi mutlak adanya. Kesejahteraan masyarakat desa, kemajuan desa, dan kemandirian desa tidak akan terwujud manakala seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan berpartisipasi dalam membangun desa. Untuk merealisasikan pembangunan yang melibatkan keikutsertaan dari masyarakat, pemerintah desa perlu mengupayakan mobilisasi partisipasi sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Pemerintah Memobilisasi Partisipasi Pembangunan Melalui Pendekatan Organisasi (Studi di Desa Pendem, Kota Batu). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) mengetahui upaya pemerintah memobilisasi partisipasi pembangunan melalui pendekatan organisasi, 2) mengetahui hambatan dan pendukung yang dilakukan oleh pemerintah memobilisasi partisipasi pembangunan melalui pendekatan organisasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9). Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penetapan lokasi penelitian karena masyarakat Desa Pendem termasuk dalam kategori masyarakat desa-kota yang ditinjau dari letak geografis sebagian masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pertimbangan lain adalah upaya pemerintah dalam memobilisasi partisipasi perlu ditempatkan pada garda depan sebagai

wacana pembangunan desa yang merupakan agenda utama dan terus mendapat perhatian demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Fokus dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah desa memobilisasi partisipasi pembangunan melalui pendekatan organisasi pada suksesnya kegiatan pembangunan prasarana perhubungan pada masyarakat desa kota. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan memperhatikan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:218). Sehingga yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah; Kepala Desa Pendem, BPD Desa Pendem, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder serta teknik pengumpul data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi (Sugiyono, 2014:225). Data yang dikumpulkan dianalisa dengan model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 246) yakni: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data display* (Penyajian Data), *Conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat dalam suatu desa sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan mobilisasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, lembaga masyarakat yang ada di desa Pendem dikelompokkan kedalam lima kelompok yaitu:

1. PKK antara lain: Pokja I (Agama), Pokja II (Pendidikan), Pokja III (Sandang), Pokja IV.
2. Keagamaan antara lain: Jama'ah Maulid, Remaja Masjid Sulaiman, Organisasi Remaja Islam Caru, Jama'ah Tahlil, Jama'ah Dhiba Muslimat, Jama'ah Dhiba Fatayat, Jama'ah Fatayat, Hippam, Jama'ah Istighosah Miftahul, dan Muhtadin.
3. Kepemudaan antara lain: Pemuda Pancasila, Karang Taruna Desa (Winda A), dan Rukun Kematian Desa.
4. Kesenian antara lain: Seni Pernapasan "Mahatma", Javen, Terbang Jidor, Terbang Jidor "Nurul Hidayah", Kuda Lumping, Bantengan, dan Kuda Lumping "Turonggo Samudro".
5. Kelompok Tani antara lain: Sri Mulyo I, Sri Mulyo II, Sri Mulyo III, Sekar Abadi, dan Gapoktan "Sri Mulyo".

Masyarakat Desa-Kota Ditinjau dari Karakter Sosial

Kehidupan bermasyarakat umumnya berbeda-beda antara masyarakat satu dengan lainnya, perbedaan itu dapat disebabkan oleh antara lain struktur masyarakat tersebut dan juga faktor tempat atau daerah yang mempunyai peranan penting. Perbedaan yang menonjol tampak pada kehidupan masyarakat desa-kota yang ditinjau dari karakter sosial.

Karakter sosial masyarakat desa-kota dalam kehidupannya telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini disebabkan oleh wilayah tempat tinggal yang telah mempengaruhi peradaban masyarakat. Masyarakat desa-kota umumnya dapat digambarkan sebagai masyarakat yang tidak tradisional dan tidak lamban perkembangannya, namun tidak cepat dan modern juga. Dalam artian masyarakat desa-kota terjadi dengan adanya transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Karakter sosial dari masyarakat desa-kota antara lain:

1. Hilangnya gotong royong dari kerja bersama menjadi kerja individu.
2. Masyarakat mulai terbuka dengan berbagai perubahan dan kemajuan zaman.

3. Adanya pergeseran tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dulunya rendah karena masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan, mulai sadar pentingnya pendidikan terutama dalam mencari pekerjaan.

Indikator Upaya Mobilisasi Masyarakat

Upaya pemerintah dalam mobilisasi masyarakat adalah suatu usaha untuk menyampaikan suatu maksud agar dapat menaikkan derajat atau kemampuan supaya terdapat perubahan yang menuju keberhasilan. Untuk mewujudkan semuanya itu perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat. Indikator dari upaya mobilisasi dapat diukur dari berbagai cara yang ditinjau dari bentuk usaha yang dibangun.

Kerjasama adalah satu bentuk partisipasi untuk memperoleh pengertian, dukungan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat umum. Adanya kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu harus ada hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kerjasama ini diadakan karena memiliki tanggung jawab bersama dan adanya kesamaan tujuan. Untuk memperjelas kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Kerja Sama Masyarakat dengan Pemerintah Desa

Kerjasama	Indikator
Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">➤ Diterima oleh organisasi➤ Proses pendampingan dan penguatan dapat berjalan
Forum Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">➤ Terbangunnya hubungan dengan masyarakat sasaran➤ Terbangunnya kepercayaan➤ Keterlibatan elemen masyarakat➤ Mengidentifikasi dan membangun kontak dengan orang kunci

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak menunggu adanya permintaan dari masyarakat, akan tetapi pemerintah desa secara aktif dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan identifikasi masalah yang ada disekitar masyarakat sehingga dapat mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam Memobilisasi Partisipasi Masyarakat

Upaya pemerintah desa Pendem dalam mobilisasi partisipasi masyarakat tidak berhenti, tetapi harus terus bergerak. Gerak ini dimulai dari elemen masyarakat terutama yang terhimpun dalam satu wadah organisasi. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pendem dengan organisasi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang bergabung didalam lingkungan organisasi dapat dipengaruhi oleh aparatur pemerintah desa. Terpengaruhnya masyarakat yang berada dalam wadah organisasi diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat yang berada di luar organisasi melalui kehidupan sosial. Dalam artian bahwa dengan adanya upaya pemerintah dalam mobilisasi partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan dengan organisasi masyarakat diharapkan dapat terjadi karena inisiatif sendiri maupun dorongan dari pihak lain. Usaha pemerintah sangat didukung oleh

Mufti (2016) bahwa adanya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berakhir pada proses pendampingan atau penguatan.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mobilisasi partisipasi masyarakat merupakan tahap awal. Dikatakan tahap awal karena mudah mendapat informasi tentang situasi umum di masyarakat, sehingga dapat dijadikan suatu acuan dalam meningkatkan mobilisasi partisipasi masyarakat. Pendekatan informal maupun formal yang telah dilakukan oleh aparatur desa dalam mobilisasi partisipasi masyarakat yang melibatkan organisasi. Melibatkan organisasi dalam mobilisasi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang merupakan esensi dari percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mempercepat pembangunan Sigalingging dan Warjio (2014) mengemukakan bahwa sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Melibatkan organisasi dalam mobilisasi partisipasi merupakan proses kerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga turut hadir dalam berbagai kegiatan. Hal yang lebih menonjol dalam upaya mewujudkan mobilisasi partisipasi masyarakat antara lain pihak pemerintah diterima oleh organisasi masyarakat dan terjadinya proses pendampingan dan penguatan. Upaya pemerintah seperti di atas lebih tepat seperti yang dijelaskan oleh Mufti (2016) bahwa dari proses identifikasi akan mudah mengarahkan pemerintah dalam memecahkan masalah sehingga menjadikan langkah bagi aparatur pemerintah.

Langkah-Langkah Aparatur Pemerintah dalam Memobilisasi Partisipasi Masyarakat

Mobilisasi masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas lebih dari sekedar pendekatan seperti partisipasi. Proses di mana kaum muda bertanggung jawab untuk belajar bagaimana menilai, rencana, bertindak, memonitor dan mengevaluasi serta sebagai wujud dari berkelanjutan. Mobilisasi masyarakat menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu langkah yang digunakan pemerintah desa dalam menjaga kesinambungan adalah melakukan pendekatan dengan kaum muda. Hal ini harus dilakukan bahwa kaum muda sebagai pembawa perubahan sekaligus sebagai generasi penerus desa harus disoroti. Hal ini terjadi karena pemerintah telah melewati proses identifikasi seperti yang dikemukakan oleh Mufti (2016), sehingga lebih lanjut Mufti (2016) mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam identifikasi akan mempermudah langkah pemerintah dalam membuat daftar organisasi, mengenal tokoh masyarakat yang dijadikan masyarakat kunci sehingga dapat dilakukan pendampingan sebagai upaya dari pemerintah.

Ditempuhnya langkah ini akan membantu individu untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan kekuatan untuk menghindari diri dari sifat apatis. Langkah ini diambil karena mobilisasi partisipasi tidak ada rumusan baku dari mana harus memulainya. Bila langkah ini adalah tahap awal maka mobilisasi partisipasi masyarakat akan bergerak lambat dan dapat berkembang sesuai dengan proses. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan individu yang mempengaruhi proses mobilisasi partisipasi masyarakat. Perbedaan yang dimaksud antara lain perbedaan pengetahuan, perbedaan sikap, dan perbedaan perilaku. Dari perbedaan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai upaya menciptakan forum masyarakat sehingga perbedaan yang ada dapat diselesaikan dengan musyawara mufakat.

Membangun Hubungan dengan Masyarakat Kunci dalam Memobilisasi Partisipasi Masyarakat

Bila upaya yang telah dilakukan tidak mendapatkan hasil positif, maka diperlukan suatu tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan akan terjadi jika mereka terlibat sekedar formalitas maka pendekatan informal perlu terus dilakukan. Untuk melanjutkan tahapan tersebut perlu identifikasi dan membangun hubungan dengan orang kunci. Sasarannya biasanya tokoh kunci di masyarakat seperti

tokoh masyarakat dan agama serta kelompok pemuda. Langkah seperti ini akan menjadi penting sehingga dapat membentuk kekuatan dan proses pendampingan dapat terwujud terciptanya interaksi dua arah antara pemerintahan dan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam tahap melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok pemuda adalah terbangunnya kepercayaan. Terciptanya kepercayaan akan membentuk kredibilitas sebagai esensi di dalam membangun hubungan dan seharusnya dilihat sebagai perekat dan pemersatu bersama. Kepercayaan akan berkembang ketika tokoh kunci dan pemerintah desa saling percaya dan berjaringan satu dengan yang lain.

Kedekatan yang dibangun oleh aparat pemerintah dengan masyarakat kunci belum adanya indikator yang jelas. Indikator yang dimaksud adalah identifikasi masyarakat harus didasarkan pada usia, lama tinggal, dan tingkat pengetahuan. Ketiga indikator ini akan memberikan pengaruh yang positif. Usia masyarakat kunci yang mapan akan memberikan kepercayaan pada masyarakat lain. Usia yang mapan tanpa adanya tingkat pengetahuan maka pelaksanaannya akan sia-sia karena cara berpikir masyarakat dapat diatasi dengan cara transfer pengetahuan dan wawasan.

Faktor Pendukung Aparatur Pemerintah dalam Mobilisasi Paartisipasi Masyarakat

Dari berbagai ulasan diatas, semuanya itu merupakan faktor pendukung. Yang menjadi faktor pendukung sehingga mobilisasi partisipasi masyarakat dapat terealisasi merupakan tanggung jawab bersama. Faktor pendukung dalam mobilisasi partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Faktor Pendukung Intern

Menyimak dari persepsi-persepsi dari informan, bahwa faktor pendukung utama dari sisi internal pemerintah yaitu adanya inisiatif untuk melakukan indentifikasi dalam menentukan siapa saja yang akan didekati. Dalam artian hasil identifikasi dari aparat sendiri didasari pada perencanaan yang matang. Hasil perencanaan yang matang dikonvers menjadi rencana tindak yang dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran. Sasaran dari rencana tindak adalah masyarakat yang di pandang dapat mempengaruhi dan menjadi pendorong utama. Selain dari pendekatan yang telah ada, aparat pemerintah juga melakukan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh aparat dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian dari acara tersebut. Maksud dari kegiatan tersebut yakni mempermudah aparat pemerintah dalam membimbing perilaku masyarakat yang dihadapkan pada pembangunan adalah milik bersama sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsi baik pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Sumbangsi ini diharapkan datang dengan sendirinya karena adanya kesamaan persepsi antara aparat pemerintah dan masyarakat.

Dari sisi masyarakat sendiri, bahwa pada dasarnya dilandaskan pada kemauan dari masyarakat itu sendiri. Kemauan masyarakat untuk berubah dalam cara pikir sangat menentukan sehingga dalam rencana tindak dari aparat pemerintah mendapatkan posisi penting yaitu dapat diterima dikalangan masyarakat.

2. Faktor Pendukung Ekstern

Hal ini pun disadari oleh berbagai elemen masyarakat khususnya setiap orang tua yang menginginkan perubahan terhadap anak-anaknya. Perubahan yang utama adalah cara berpikir individu menuju ke cara berpikir bersama. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah berbuah dalam mendapatkan dukungan penuh. Dukungan ini harus dimanfaatkan oleh pihak aparat pemerintah sehingga kepercayaan dan dukungan yang telah diperoleh tidak sirna begitu saja. Hadirnya orang tua dengan maksud bahwa aparat pemerintah memiliki dukungan dari luar sturtural sehingga dapat menjadi penggerak bagi masyarakat.

Kesuksesan mobilisasi masyarakat sebaiknya diukur bukan dari keberlangsungan kelompok masyarakat, akan tetapi melalui kemampuan dari masyarakat untuk bergerak dalam memetakan persoalan-persoalan sosial masyarakat serta mampu mengidentifikasi solusinya dan dijadikan sebagai potensi.

Faktor Penghambat Aparatur Pemerintah dalam Mobilisasi Paartisipasi Masyarakat

Upaya yang dilakukan aparatur desa dalam mobilisasi partisipasi masyarakat tidak selamanya berjalan lancar. Ada dukungan ada pula hambatan dalam mobilisasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam melihat hambatan yang ada, dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Faktor Penghambat Internal

Dari sisi internal, mobilisasi partisipasi yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah yaitu berasal dari kelompok masyarakat yang didalamnya ada individu-individu tertentu yang memiliki sikap ketergantungan terhadap aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Ketergantungan ini dapat menjadi hambatan karena rasa inisiatif dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan hanya berwujudkan partisipasi, sementara pada konsep mobilisasi yang menjadi indikator utam adalah kemauan dalam mengembangkan kemampuan. Kemampuan masyarakat yang terbatas juga merupakan hambatan dalam mobilisasi partisipasi. Di sisi lain, aparatur pemerintah juga kurang melakukan sosialisasi. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bersifat momentum.

2. Faktor Penghambat Eksternal

Hambatan eksternal sendiri tidak jauh berbeda dengan internal. Dimana internal menekankan pada kemauan individu, sedangkan eksternal menekankan pada aspek sosial. Dalam hal ini, aspek sosial yang dipandang adalah kedekatan yang dibentuk menjadi kekuatan didasarkan pada identifikasi masyarakat yang menjadi elemen kunci. Kedekatan aparatur pemerintah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat. Beberapa tokoh ini menjadi petaruh kunci yang dianggap sebagai pemberi pengaruh terhadap masyarakat sasaran pada umumnya. Hal ini tidak semata-mata dapat menjadi mobilisator tanpa mempertimbangkan usia, tingkatan pendidikan, serta lamanya menjadi anggota masyarakat. Hal yang kritis adalah tingkatan pendidikan. Bila dalam rencana tindak aparatur memperhatikan pendidikan elemen kunci, maka pengetahuan dan wawasan dari elemen kunci dapat ditransfer kepada masyarakat sasaran.

Solusi Aparatur Pemerintah dalam Mobilisasi Paartisipasi Masyarakat

Selain hambatan, aparatur pemerintah sendiri tidak kehilangan akal dalam mencari solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai solusi terus dilakukan oleh pihak aparatur pemerintah seperti terus melakukan sosialisasi tentang konsep kombinasi *top down* dan *bottom up* kepada masyarakat. Selain sosialisasi pemerintah juga menyediakan ruang publik (forum masyarakat) yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil identifikasi. Ruang publik seperti ini mampu menciptakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga tanpa sadar masyarakat akan berpartisipasi. dari solusi yang ditawarkan dapat menjadi pendekatan dan penguatan kembali transformasi nilai-nilai kedalam tindakan nyata dan menekankan pada kondisi yang memudahkan. Harapannya adalah terwujudnya kesadaran masyarakat yang dibentuk dari individu. Tokoh masyarakat juga akan menjadi lebih sadar dan akan terwujudnya perubahan sikap.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:Upaya aparatur pemerintah dalam mobilisasi partisipasi masyarakat di Desa Pendem telah sampai pada rencana tindak seperti adanya

identifikasi, pendekatan formal, forum masyarakat dan pendampingan. Upaya pemerintah diwujudkan dengan langkah membuat daftar organisasi dan mengenal tokoh masyarakat dijadikan masyarakat kunci sehingga mampu menciptakan strategi yang mampu mengajak organisasi-organisasi untuk mewujudkan upaya pemerintah. Langkah yang diambil akan terciptanya hubungan antara masyarakat kunci sehingga dapat memperkuat proses pendampingan atau penguatan dari komponen masyarakat kunci kepada masyarakat yang lain. Faktor-faktor pendukung dalam mobilisasi partisipasi masyarakat yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, faktor penghambat utama yaitu cara berpikir yang masih individu dari sebagian masyarakat, dan solusi untuk meminimalisir yaitu adanya forum masyarakat yang diusahakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufti, Muslim. 2016. *Teori Politik: Mobilisasi*. diakses pada tanggal 22 April 2018 <http://www.anakadam.com/2016/08/teori-politik-mobilisasi/>
- Sigalingging, A. Henry. 2014. *Pertisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 2. Pp 116-145.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan.